



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Juli 2026

Halaman: 4

TAJUK

Membenahi Mandala Krida Tanpa Mengulang Kesalahan yang Sama

Upaya melanjutkan pembenahan Stadion Mandala Krida kembali mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menyatakan kesiapannya untuk membantu mempertemukan Pemda DIY dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih menghambat pengembangan stadion kebanggaan warga Kota Jogja tersebut.

Persoalan Mandala Krida memang bukan perkara

sederhana. Publik masih mengingat kasus korupsi pembangunan stadion yang menyeret sejumlah pihak dan berujung pada proses hukum.

Kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan infrastruktur olahraga, betapa pun pentingnya, harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, kebutuhan untuk melanjutkan pembenahan Mandala Krida tidak dapat terus ditunda. Stadion ini merupakan salah satu fasilitas olahraga terbesar di DIY yang selama

bertahun-tahun menjadi tempat pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, hingga ruang aktivitas masyarakat. Belum lagi, klub sepak bola asal DIY, PSIM Jogja yang selama ini menghuni stadion itu pun, kini mulai membutuhkan *homebase*.

Karena itu, upaya mempertemukan Pemda DIY dengan KPK patut diapresiasi. Kehadiran lembaga antirasuah dalam proses konsultasi dan pendampingan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Pendekatan semacam ini

penting agar kekhawatiran terhadap aspek hukum tidak berubah menjadi kebuntuan pembangunan yang berkepanjangan.

Namun demikian, masyarakat, khususnya para suporter dan komunitas olahraga, juga perlu memahami bahwa penyelesaian persoalan Mandala Krida membutuhkan proses. Tidak semua tahapan dapat dipercepat hanya karena adanya desakan publik. Kajian teknis, penyesuaian anggaran, hingga mekanisme pengadaan harus berjalan sesuai aturan yang

berlaku.

Kesabaran menjadi bagian penting agar hasil yang diperoleh nantinya benar-benar berkualitas dan memiliki kepastian hukum. Kesabaran bukan berarti pasif. Suporter dan masyarakat tetap harus mengawal setiap proses yang berjalan. Pengawasan publik diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan renovasi berlangsung secara efisien, terbuka, dan tidak kembali terjatuh persoalan yang melanggar hukum. Dukungan yang kritis tetapi konstruktif akan membantu memastikan Mandala Krida

tidak lagi menjadi simbol proyek yang tersendat, melainkan menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilanjutkan dengan prinsip kehati-hatian.

Perlu diingat bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar stadion yang lebih megah, melainkan stadion yang lahir dari proses yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi olahraga DIY. Mandala Krida layak dibenahi, tetapi pembenahan itu harus berjalan di atas fondasi tata kelola yang kuat agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005